

Judul : Ada badan otorita pengelola pantura, tanggul raksasa segera dibangun
Tanggal : Jumat, 29 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Ada Badan Otorita Pengelola Pantura **Tanggul Raksasa Segera Dibangun**

SENAYAN menyambut baik hadirnya lembaga baru Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa. Disarankan, lembaga baru ini dibarengi kejelasan tugas dan kewenangan agar tidak tumpang tindih dengan kementerian lain.

Anggota Komisi V DPR Syafiuddin mengatakan, masyarakat perlu kepastian apakah Badan Otorita ini hanya fokus pada megaprojek Giant Sea Wall Pantura atau juga menangani isu lain. Seperti pengelolaan pesisir, tata ruang kawasan, transportasi, hingga perlindungan lingkungan.

"Jangan sampai keberadaannya hanya menjadi lembaga baru tanpa arah yang konkret, apalagi tumpang tindih dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, maupun KLHK," ujar Syafiuddin, Rabu (27/8/2025).

Presiden Prabowo sebelumnya melantik Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, didampingi Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala. Pengangkatan itu berdasarkan Keppres Nomor 76 P Tahun 2025.

Menurut Syafiuddin, Pantura merupakan kawasan strategis dengan tantangan kompleks, mulai dari abrasi pantai, banjir rob, hingga kepadatan transportasi. Karena itu, Badan Otorita harus mampu menyinergikan program lintas sektor. "Kalau

hanya mengurus satu proyek besar, itu bisa dikerjakan kementerian teknis," tegasnya.

Ia meminta Pemerintah segera menyosialisasikan peta tugas, fungsi, dan target kinerja Badan Otorita. "Transparansi penting sejak awal agar masyarakat tahu arah pembangunan Pantura. Dan, DPR bisa mengawal agar benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar proyek mercusuar," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Rizal Bawazier menilai kehadiran Badan Otorita Pantura sebagai momentum penting, terutama untuk percepatan pembangunan tanggul laut raksasa di wilayah pesisir Jawa Tengah. "Gerak cepat sangat dibutuhkan agar tanggul raksasa segera dibangun," kata Rizal.

Menurutnya, prioritas harus diberikan untuk kawasan Ulujami Pemalang, pesisir Pekalongan, hingga pantai barat Batang yang paling rentan banjir rob. "Masyarakat sudah lama menunggu proyek ini demi menyelamatkan kehidupan mereka," tambahnya.

Rizal bilang, rob di Pantura telah menyebabkan ribuan rumah tergenang, lahan pertanian rusak, hingga aktivitas ekonomi lumpuh. Kondisi itu tidak hanya merugikan warga tetapi juga mengancam sektor industri, perdagangan, serta jalur transportasi vital nasional. ■ TIF